

# Naskah Kebijakan

Issue 1 | Vol. 3 | 2022

**CONVEY Indonesia** dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset, survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebhinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

## Moderasi Beragama: Penguatan Pendidikan Politik dan Komitmen Kebangsaan di Lembaga Pendidikan

**Editor:**

Fuad Jabali, Ph.D.

**Penyusun:**

Aptiani Nur Jannah



## Ringkasan Eksekutif

Riset dan survei yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menemukan beberapa permasalahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Problematika kebangsaan yang beredar di lingkungan pendidikan ini antara lain:

- Persepsi negatif terhadap pemerintah yang sah  
Survei dan riset PPIM UIN Jakarta menemukan adanya persepsi negatif pada sistem pemerintahan yang dijalankan negara Indonesia dan kebijakan yang diambil pemerintah di lingkungan pendidikan.
- Dukungan pada paham islamisme di Indonesia.  
Survei dan riset juga menemukan dukungan terhadap penerapan sistem Islam di aspek kehidupan negara di kalangan guru, dosen, siswa dan mahasiswa.
- Meningkatnya ketidakpercayaan pada pemerintah kala pandemi.  
Hasil survei nasional PPIM di tahun 2021 juga menemukan tingginya kepercayaan terhadap hoax atau berita tidak benar dan meningkatnya sentimen anti-negara di kalangan pelajar kala pandemi.
- Politisasi agama  
Kajian PPIM di media sosial dalam rentang tahun 2009-2019 menemukan adanya kecenderungan eratnya penggunaan isu agama dan politik terutama pada tahun-tahun politik.  
Untuk menghadapi permasalahan tersebut, penguatan sikap dan perilaku beragama yang moderat, inklusif dan toleran melalui pengarusutamaan Moderasi Beragama masih harus terus didukung.

### Rekomendasi:

1. Penguatan pendidikan politik dan komitmen kebangsaan di lembaga pendidikan.
2. Pengembangan penyiaran narasi keagamaan yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemaslahatan umat di lembaga pendidikan.

## Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif\_\_\_\_\_2

Daftar Isi\_\_\_\_\_3

I. Pendahuluan\_\_\_\_\_4

II. Pembahasan\_\_\_\_\_6

III. Rekomendasi Program dan Kebijakan\_\_\_\_\_13

IV. Penutup\_\_\_\_\_17

## I. Pendahuluan

Penguatan moderasi beragama di Indonesia masih menjadi langkah strategis yang diperlukan dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap dan perilaku yang tidak ekstrem. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penguatan moderasi beragama menjadi program prioritas nasional. Tujuannya adalah untuk mengembalikan esensi agama, yaitu menjaga martabat manusia; mengembalikan teks pada konteksnya; dan merawat keindonesiaan yang multikultural. Untuk merealisasikan program ini ada lima kegiatan prioritas yang mencakup: 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah; 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama; 3) penguatan relasi agama dan budaya; 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

Naskah kebijakan ini melihat masih pentingnya Moderasi Beragama sebagai program prioritas nasional di RPJMN periode berikutnya. Permasalahan kebangsaan terkait praktik beragama yang eksklusif dan ekstrim masih ditemukan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Agama sentral posisinya dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut hasil riset Pew Research Center (2020), penduduk Indonesia termasuk dari orang-orang paling religius di dunia. Survei pada 34 negara ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling agamis. Sebanyak 96% responden memandang keimanan sebagai syarat utama dalam menanamkan nilai-nilai moralitas dan kebajikan. Mayoritas penduduk Indonesia juga memandang Tuhan dan ibadah sebagai bagian terpenting dalam hidup. Mereka menjadikan identitas agama sebagai faktor signifikan dalam pembentukan identitas sosial. Maka wajar jika warga yang kecewa dengan sistem pemerintahan yang dianut negara beralih ke ajaran agama. Akar ekstremisme berasal dari narasi anti pemerintah yang berkembang di masyarakat. Ketidakpercayaan dan ketidakpuasan pada kinerja pemerintah mendorong masyarakat mencari sistem alternatif terutama dalam agama. Syariat islam dan khilafah menjadi solusi yang dianggap mampu memecahkan kekosongan yang ditinggalkan pemerintah. Sikap ini kemudian tercermin dari paham keagamaan yang ekstrim, eksklusif dan intoleran.

Indonesia masih menghadapi lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran dilihat dari ditemukannya paham ekstrimisme dan konflik antar

umat beragama yang terjadi. Di level *grass root*, intoleransi terjadi bahkan di lingkungan pendidikan. Misalnya pada tahun 2020, terjadi pemaksaan pemakaian penutup kepala atau hijab bagi siswi SMK Negeri 2 Padang yang beragama non-Islam. Di tahun yang sama, terjadi penolakan terhadap kandidat ketua OSIS non-muslim di sekolah di Depok. Penolakan pemimpin non-muslim juga terjadi di Pilkada DKI Jakarta tahun 2016 dan juga lurah Lenteng Agung di tahun 20. Perilaku intoleran juga terermin dari aksi penolakan terhadap pendirian bangunan rumah agama di berbagai daerah seperti pelarangan pembangunan Gereja GKI Yasmin di Bogor, pelarangan kegiatan keagamaan dan pendirian Gereja di Kupang, sengketa terkait pendirian rumah ibadah Jemaat Gereja Baptis Indonesia Tlogosari di Kota Semarang (Komnas HAM 2020, 69), hingga perusakan rumah ibadah gereja di Samarinda (Kompas, 2021) yang dilakukan oleh beberapa kelompok muslim. Tidak hanya perilaku intoleran, kekerasan berbasis agama juga ditemukan terjadi di beberapa daerah.

Penggunaan kekerasan atas nama agama telah terjadi di Indonesia dari Bom Bali hingga penyerangan terhadap rumah ibadah seperti gereja dan masjid milik kelompok minoritas. Sepanjang tahun 2021, Densus 88 menangkap 370 ekstremis, naik 228 orang dari penangkapan tahun sebelumnya. Kekerasan terhadap aparat negara juga ditemukan di beberapa kasus. Sikap anti pemerintah telah dilakukan oleh berbagai kelompok. Mengusung sistem politik Islam, beberapa kelompok secara terang-terangan menolak sistem politik yang dianut oleh Indonesia dan memimpikan terwujudnya sistem Islam. Aparat negara sebagai simbol dari negara turut menjadi sasaran kekerasan kelompok anti pemerintah. Tahun 2013, terjadi sebanyak tiga kali perusakan Pos Polisi di Semarang. Di tahun yang sama terjadi kasus penyerangan pada Kantor Bupati Gowa Sulawesi Selatan. Lalu kasus terbaru di tahun 2021, terjadi aksi penyerangan terhadap Mabes POLRI oleh seorang perempuan mengatasnamakan agama.

Beberapa kasus ini menggambarkan permasalahan yang sedang melanda Indonesia. Hal ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk terus memperkuat upaya membentuk harmoni sosial. Salah satu upaya negara yang sudah dilakukan adalah dengan menjadikan Moderasi Beragama sebagai program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program ini berupaya untuk mengembalikan esensi agama, yaitu menjaga martabat manusia; mengembalikan teks pada konteksnya; dan merawat keindonesiaan yang multikultural. Namun dengan melihat berbagai kasus dan riset yang menunjukkan permasalahan kebangsaan yang masih terus terjadi penguatan Moderasi Beragama masih dibutuhkan. Naskah kebijakan ini melihat perlunya mempertahankan moderasi beragama pada RPJMN 2025-2029 terutama dengan menambahkan fokus khusus pada penguatan cara pandang moderat di lembaga pendidikan.

## II. Pembahasan

Menangani ekstremisme kekerasan merupakan salah satu prioritas utama negara dalam membangun keamanan dan ketertiban nasional. Namun kasus kekerasan terutama yang mengatasnamakan agama masih banyak ditemukan di tengah masyarakat. Ekstremisme kekerasan sendiri merupakan segala tindakan yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk memenuhi tujuan sosial, politik dan ekonomi (USAID, 2011). Upaya penanganan ekstremisme tidak hanya melihat tindak kekerasan saja tetapi jauh dari itu harus menggali akar permasalahan yang memicu pelaku kekerasan terutama motivasi yang melatarbelakangi tindak kekerasan. Akar penyebab ekstremisme beragam bentuknya dan terbentuk dari pertemuan antara berbagai faktor pendorong seperti kemiskinan, diskriminasi, pelanggaran HAM dan faktor latar belakang individu seperti rasa ketidakpuasan, depresi, dan lain sebagainya. Strategi pencegahan ekstremisme harus meliputi upaya dalam meningkatkan akses pada sumber daya yang dapat memenuhi kesejahteraan individu dan masyarakat (Weine dkk., 2016). Dibandingkan hanya melihat perilaku individu yang terlibat dalam ekstremisme, penting juga untuk mempelajari lebih dalam faktor motivasi sosial, politik dan ekonomi di balik aksi kekerasan.

Studi Bartlett dkk (2010) menemukan karakteristik sosial yang ditemukan pada muslim yang terpapar ekstremisme yaitu adanya pengalaman terkucilkan, tidak percaya pada pemerintah dan kebencian pada kebijakan pemerintah. Juga ditemukan tingginya tingkat ketidakpercayaan pada lembaga pemerintahan di kalangan ekstremis (Bartlett dkk., 2010, 10). Persepsi akan lemahnya pemerintah dalam menjalankan tugasnya mengelola negara menjadi motivasi besar seseorang dapat terpapar ekstremisme. Pada konteks Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, penting untuk melihat persepsi masyarakat muslim akan kinerja pemerintah. Di tahun 2018, survei PPIM menunjukkan walaupun secara umum kinerja pemerintah dinilai baik, namun aspek performa pemerintah dalam hal penegakan hukum dan pemenuhan ekonomi cenderung negatif. Sebanyak 69,79% menyatakan bahwa penegakkan hukum di Indonesia masih dianggap tidak adil. Begitu juga pandangan pada kondisi ekonomi. Mayoritas menganggap kondisi ekonomi masih belum cukup ideal. Sebanyak 76,60% menyatakan kondisi perekonomian saat ini kurang bagus hingga sangat buruk. Ujaran

senada juga ditemukan terkait kesenjangan ekonomi. Sebanyak 52,28% menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin saat ini buruk. Tingginya tingkat ketidakpercayaan pada pemerintah terutama dalam bidang hukum dan ekonomi dikhawatirkan dapat memicu pencarian sistem alternatif yang lebih dipercaya. Dalam kasus Indonesia, kecenderungan ini diikuti oleh dukungan yang tinggi pada syariat Islam dan sistem pemerintahan Islam yang dianggap mampu menjawab keresahan sosial ekonomi masyarakat muslim.

Kurangnya kepercayaan pada pemerintah memberi ruang bagi kelompok konservatif untuk mengembangkan pengaruhnya sebagai antitesis negara. Hal ini ditandai dengan menjamurnya paham konservatisme agama di tengah masyarakat yang mengusung pemurnian praktik keagamaan. Di media sosial misalnya paham keagamaan yang cenderung konservatif menguasai perbincangan di ranah maya dengan persentase (67.2%), disusul dengan moderat (22.2%), liberal (6.1%) dan Islamis (4.5%). Sejak 2009-2019, penggunaan hashtag (tanda pagar, tagar) yang bersifat konservatif menjadi yang paling populer. Hashtag yang bersifat netral penggunaannya bahkan kerap dikaitkan dengan paham keagamaan konservatif. Pemurnian ajaran Islam ini kemudian mendorong sikap aspirasi terhadap implementasi ajaran Islam di seluruh sendi kehidupan termasuk ekonomi dan politik. Di tahun 2018, survei PPIM menemukan mayoritas siswa dan mahasiswa (91,23%) mendukung pemerintah menerapkan syariat Islam. Dukungan pada syariat Islam juga tampak jika dilihat lebih spesifik pada topik penerapannya. Misalnya ketika ditanya pandangan terhadap hukum cambuk, sebanyak 62,56% menyatakan setuju bahwa hukum Islam bagi pelaku zina adalah cambuk.

Meningkatnya ketidakpercayaan pada sistem pemerintahan yang dijalankan negara juga membuat ideologi Islamisme dan pemikiran anti demokrasi muncul menawarkan sistem politik yang diakui bersumber dari agama Islam. Pandangan Islamisme mengacu pada aspek bagaimana syariat Islam diterapkan dalam semua ranah politik dan menekankan pentingnya syariat dijadikan sumber referensi utama dalam semua aspek kehidupan. Salah satu wujud pemerintahan yang dianggap sah menurut ajaran agama adalah sistem khilafah. Sebanyak 61,92% menganggap bahwa khilafah adalah sistem pemerintahan Islam. Di media sosial, kelompok Islamis lantang menyuarakan pandangannya akan negara yang benar menurut Islam yaitu khilafah. Dengan menyajikan argumentasi kelemahan demokrasi dan kekurangan pemerintah dalam menjalankan kinerjanya, mereka menyajikan sistem politik alternatif yang diklaim lebih dapat menjawab kegusaran masyarakat dibandingkan sistem yang dianut Indonesia saat ini.

Pemikiran anti demokrasi dan dukungan pada sistem pemerintahan khilafah ini juga tersebar di lingkungan pendidikan. Survei Nasional PPIM di tahun 2018 menunjukkan sebanyak 9.84% siswa dan mahasiswa menganggap Pancasila dan UUD 1945 tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam dan 15% siswa dan mahasiswa tidak setuju demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik. Bahkan sebanyak 19.26% siswa dan mahasiswa menganggap Pemerintah Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 adalah kafir dan thaghut. Tidak hanya itu, 38.08% siswa dan mahasiswa berpikir kekhalifahan adalah bentuk pemerintahan yang diakui Islam. Hal ini menunjukkan meluasnya paham islamisme di kalangan pelajar baik di sekolah maupun universitas.

Tidak hanya di kalangan pelajar, paham islamisme juga menjangkiti kaum pendidik. Survei PPIM tahun 2019 terhadap guru juga menemukan kecenderungan dukungan pada islamisme. Berikut ini gambaran Islamisme guru Indonesia:

- Sebanyak 40.36% guru setuju bahwa seluruh ilmu pengetahuan sudah ada dalam Al Quran sehingga Muslim tidak perlu mempelajari ilmu pengetahuan yang bersumber dari Barat.
- Sebanyak 82.77% guru setuju bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi segala persoalan masyarakat.
- Sebanyak 62.22% guru setuju bahwa hanya sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam yang terbaik untuk negeri ini.
- Sebanyak 75.98% guru setuju bahwa pemerintah harus memberlakukan syariat Islam bagi para pemeluknya.
- Sebanyak 79.72% guru setuju bahwa dalam memilih pemimpin (presiden, gubernur, bupati/walikota), umat Islam wajib memilih calon pemimpin yang memperjuangkan penerapan syariat Islam.
- Sebanyak 23.42% Guru setuju bahwa pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 adalah thaghut karena telah mengambil hak Allah sebagai pembuat hukum.

Jika dilihat lebih dekat lagi pada latar belakang guru maka bisa dilihat guru sekolah swasta dan guru pengampu mata pelajaran yang tidak diujikan pada Ujian Nasional memiliki opini intoleran dan radikal lebih tinggi dengan sebaliknya. Bila didasarkan pada status guru sekolah negeri dan swasta, perbedaan signifikan terjadi pada opini dan intensi-aksi toleransi pada pemeluk agama lain ( $t=2.043$ ,  $p=0.041$ ;  $t=2.954$ ,  $p=0.003$ )

serta radikalisme ( $t=2.150, p=0.032$ ;  $t=2.855, p=0.004$ ). Guru sekolah/madrasah swasta lebih intoleran dibandingkan guru sekolah/ madrasah negeri. Guru sekolah/madrasah swasta lebih radikal dibandingkan guru sekolah/madrasah negeri. Perbedaan signifikan hanya terjadi pada toleransi pada pemeluk agama lain, opini radikal ( $F=2.494, p=0.008$ ) dan Intensi Aksi Radikal ( $F=3.701, p=0.000$ ) bila didasarkan pada mata pelajaran yang diampu. Bila dilihat dari mean, hasilnya menunjukkan bahwa guru-guru mata pelajaran Bahasa (misalkan Bahasa Arab), Olahraga & Kesenian, Bahasa Daerah, memiliki intoleransi, opini dan intensi-aksi radikal yang lebih tinggi dibandingkan guru mata pelajaran lainnya. Di tahun sebelumnya, guru pengampu mata pelajaran yang diujikan di Ujian Nasional dan guru di sekolah negeri relatif mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan sebaliknya. Tingkat kesejahteraan guru pengampu mata pelajaran yang tidak diujikan lebih rendah dibandingkan sebaliknya. Temuan riset ini menunjukkan guru dengan latar belakang kesejahteraan kurang memiliki tingkat intoleransi yang lebih tinggi dan lebih rawan terpapar ekstremisme.

Beberapa data di atas menunjukkan problematika bangsa dan negara yang dihadapi di lingkungan pendidikan khususnya paham anti pemerintah yang banyak dianut oleh baik guru maupun pelajar. Dukungan pada khilafah atau pemikiran anti pemerintah yang sah dapat menjadi jalan bagi masuknya paham ekstremisme. Pemahaman ekstrim tersebut dapat mendorong seseorang mengambil aksi kekerasan. Dibekali dengan pemikiran tersebut, seseorang dapat melakukan penyerangan secara fisik terhadap pemerintah atau yang dianggap berafiliasi dengan kekuasaan. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di situasi normal tapi juga saat pandemi. Virus Covid-19 telah banyak merubah aspek kehidupan masyarakat. Penyakit koronavirus menyebar di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Jutaan kasus ditemukan dan menyebabkan ratusan ribu kematian. Ketidakpastian membuat sentimen negatif terhadap pemerintah meningkat saat pandemi. Hal ini seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap hoax dan paham anti pemerintah.

Situasi pandemi mempengaruhi isu kesejahteraan dan berpotensi meningkatkan kerentanan individu terhadap ekstremisme kekerasan di tengah masyarakat yang terdampak pandemi. Dalam situasi yang rapuh di tengah pandemi, akses kesehatan, keamanan dan informasi terpercaya menjadi sulit untuk didapatkan terutama bagi kalangan masyarakat dengan sumber daya ekonomi terbatas dan sebagian masyarakat yang mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Pengetahuan yang baik akan pandemi sulit disaring di tengah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat. Penanganan

terhadap pandemi juga masih jauh dari sempurna meski berbagai upaya telah dikerahkan berbagai pihak. Dalam banyak kasus, hal ini memberikan peluang bagi kelompok-kelompok ekstremis kekerasan untuk memanfaatkan situasi, baik dengan menggunakan kekurangan akses sebagai motivasi dalam rekrutmen anggota atau dengan mengisi kekosongan yang diciptakan oleh ketidakmampuan lembaga-lembaga negara untuk merespons krisis secara tepat.

Meski informasi mengenai pandemi tersedia secara luas, arus informasi yang deras dari berbagai pihak memungkinkan generasi muda Indonesia terpapar hoax. Hasil survei nasional PPIM tahun 2021 menemukan siswa-siswi di Indonesia masih banyak yang percaya pada hoax atau berita tidak benar. Sebanyak 42,88% siswa meyakini vaksin bertentangan dengan agama mereka, 39% siswa percaya pandemi Covid-19 merupakan hukuman Tuhan, 48% siswa bersikap pesimis saat pandemi Covid-19 karena mereka merasa sepatuh apa pun mereka di tengah pandemi Covid-19, hal itu tidak akan menghentikan laju penyebaran virus, 20,5% siswa percaya Covid-19 hanyalah flu biasa yang hanya diglorifikasi oleh beberapa pihak tertentu, 31,5% siswa menjustifikasi rumah sakit sengaja memberi hasil positif pada pasien Covid-19 demi mendapat dana bantuan, bahkan 20,5% siswa yang disurvei meyakini bahwa Covid-19 merupakan senjata biologis negara maju untuk negara berkembang.

Studi PPIM di tahun 2021 memandang absennya negara memicu sentimen anti-negara di kalangan siswa. Saat Pandemi Covid-19, level Islamisme pada siswa-siswi Muslim Indonesia relatif tinggi. Sebanyak 91,4% responden memandang harusnya dukungan terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia, 82,7% mendukung sistem pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam dan di bawah kepemimpinan ahli agama, 78,5% berpendapat sistem pemerintahan yang diakui Islam adalah berdasarkan khilafah dan yang mengkhawatirkan adalah sebanyak 25,2% memandang Tindakan pengeboman atau bom bunuh diri atas nama agama adalah jihad (PPIM, 2021). Ketika dibandingkan data survei nasional terhadap siswa yang dilakukan oleh PPIM pada tahun 2017 dan 2021, tidak banyak ditemukan perubahan berarti. Bahkan dalam beberapa hal, terlihat peningkatan pada persentase seperti yang terlihat di gambar di bawah ini:

Gambar 1 Data Siswa 2017 dan 2021 tentang Islamisme



Temuan lain dari penelitian yang dilakukan PPIM pada tahun 2020 adalah terkait politisasi narasi keagamaan yang berdampak bagi peningkatan paham konservatisme di media sosial. Hal ini terlihat dari tingginya keterkaitan isu agama dengan politik. Konteks politik berperan penting dalam konstruksi narasi keagamaan di media sosial. Isu agama di Twitter banyak mengalami perubahan sesuai dinamika kondisi politik. *Hashtag*keagamaan umum meningkat di bukan tahun politik namun menurun di tahun-tahun politik. Sedangkan *hashtag*politik banyak muncul di tahun politik terutama sejak pemilu 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi politik di Indonesia seringkali berkisar di isu agama. Untuk menarik simpati masyarakat, identitas dan isu agama digunakan oleh berbagai pihak. Tidak hanya pada tingkat elit politik, agama dan politik juga acapkali diusung oleh simpatisan dari kalangan bawah. Narasi agama pada umumnya dimanfaatkan untuk kepentingan politik sebagai sumber perebutan massa. Politisasi narasi agama tidak hanya dilakukan oleh partai Islam tapi juga oleh hampir semua partai politik termasuk partai Nasional. Terjadi fenomena diseminasi konflik kepentingan elit di ruang publik melalui persebaran narasi keagamaan di media sosial.

Di tahun politik, isu agama meningkat seiring dengan dukungan maupun serangan pada politisi yang berkompetisi dalam pemilihan pemimpin. Latar belakang agama calon pemimpin banyak menjadi sumber perdebatan masyarakat. Tak terkecuali calon pemimpin dari agama yang berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia. Hal ini bukan hal baru melainkan pemikiran yang sudah berkembang di masyarakat namun

mencuat di media sosial kemudian pada beberapa kasus dijadikan justifikasi untuk mobilisasi massa. Seperti yang ditemukan pada survei nasional oleh PPIM di tahun 2018. Survei menunjukkan sebesar 55.37% masyarakat setuju untuk mengajak masyarakat lainnya untuk memilih calon kepala daerah yang beragama islam, 78.34% masyarakat tidak setuju non-muslim menjadi presiden RI. 71.19% tidak setuju non-muslim menjadi wakil presiden, 70.02% tidak setuju non-muslim menjadi Gubernur, dan 67.38% tidak setuju non-muslim menjadi walikota/bupati. Survei nasional terhadap guru di tahun 2018 juga menemukan fenomena yang sama dimana sebanyak 64.23% Guru setuju bahwa non-Muslim tidak diperbolehkan menjadi Presiden di Indonesia. Hasil temuan survei ini mengkhawatirkan karena opini intoleran anti pemimpin yang memiliki latar belakang yang berbeda dapat dipolitisasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan memperkeruh politik Indonesia.

Bisa disimpulkan terdapat permasalahan berbangsa dan bernegara yang serius melanda lembaga pendidikan. Pertama, sentimen negatif terhadap pemerintah yang dimiliki oleh sebagian dari pelajar dan pendidik kita. Kedua, dukungan bagian dari guru, siswa, dosen dan mahasiswa pada sistem politik islam untuk menggantikan sistem yang dianut negara saat ini. Ketiga, di saat pandemi kepercayaan pada berita hoax dan ketidakpercayaan pada pemerintah meningkat di lingkungan pendidikan. Terakhir, penggunaan agama dalam politik praktis yang belakangan semakin memecah belah bangsa. Keempat permasalahan ini merupakan tantangan bagi nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini hadir di segala sendi kehidupan bangsa dan negara. Solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah terus berupaya menguatkan pengamalan dan pemahaman agama yang moderat, inklusif dan damai agar perdamaian, kerukunan dan stabilitas negara senantiasa terjaga.

### III. Rekomendasi Program dan Kebijakan

Promosi perilaku beragama yang inklusif melalui pengarusutamaan Moderasi Beragama di lingkungan pendidikan masih dibutuhkan. Secara umum, pengarusutamaan Moderasi Beragama perlu dukungan dari berbagai aspek. Penguatan dukungan meliputi penguatan pada aspek regulasi, kelembagaan, anggaran, SDM. Secara khusus, penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan yang banyak terpapar paham islamisme dan anti pemerintah dilakukan dengan penguatan pendidikan politik di lingkungan pendidikan. Politik dan pendidikan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Lingkungan sekolah dibentuk oleh konteks sosial, ekonomi dan politik yang kemudian mempengaruhi perumusan kebijakan dan program terkait pendidikan. Di sisi lain, sekolah menjadi tempat dimana isu sosial, ekonomi dan politik diejawantahkan melalui sistem dan struktur pendidikan termasuk kurikulum, pedagogi dan segala aspek yang berhubungan dengan guru dan siswa di ruang kelas. Intervensi kebijakan seharusnya lebih menysasar lembaga pendidikan. Maka pendekatan preventif terhadap ideologi islamisme dan anti pemerintah harus lebih diperkuat melalui jalur pendidikan.

Penguatan moderasi beragama dapat mengatasi problematika anti berbangsa dan bernegara yang melanda lingkungan pendidikan. Pemerintah telah mencanangkan program tersebut yang termuat dalam salah satu poin dalam Arah Kebijakan dan Strategi RPJMN 2020-2024 yaitu:

Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama, mencakup:

- a. Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat;
- b. Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru;
- c. Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan;
- d. Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran; dan

e. Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa.'

Kebijakan tersebut merupakan sebuah langkah yang penting dan strategis dalam mengatasi permasalahan kebangsaan sehingga perlu dipertahankan dalam RPJMN berikutnya. Namun dibutuhkan strategi yang berbeda dalam upaya menguatkan moderasi beragama di seluruh lapisan masyarakat. Target dari penguatan moderasi beragama hendaknya dikelompokkan sesuai latar belakang dan konteks sosial ekonomi. Setiap target kelompok memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda sehingga berbeda penanganan dan strategi yang disiapkan. Pada naskah kebijakan ini, lembaga pendidikan termasuk di dalamnya guru, dosen, siswa dan mahasiswa menjadi target kelompok program berdasarkan permasalahan yang sudah dijabarkan sebelumnya. Fokus kebijakan perlu ditekankan pada penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan. Untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial dibutuhkan upaya penguatan moderasi beragama melalui transformasi sosial di lingkungan pendidikan.

Untuk membangun lembaga pendidikan yang moderat, inklusif dan toleran sebagai solusi dari permasalahan kebangsaan yang sedang dihadapi, moderasi beragama dan nilai-nilai yang dikandungnya harus masuk ke dalam lembaga pendidikan. Diperlukan penerapan program penguatan moderasi beragama terutama berfokus pada aspek pendidikan politik dan komitmen kebangsaan di lingkungan pendidikan. Diantara program yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Penguatan pendidikan politik dan komitmen kebangsaan di lembaga pendidikan yang mencakup:
  - a. Pengenalan pendidikan politik dan komitmen kebangsaan pada guru dan siswa serta dosen dan mahasiswa;
  - b. Pengembangan kurikulum, materi dan buku ajar, serta pelatihan yang berfokus pada pendidikan politik dan komitmen kebangsaan; dan
  - c. Pengembangan kegiatan di luar kelas untuk menanamkan pendidikan politik dan komitmen kebangsaan.
2. Pengembangan penyiaran narasi keagamaan yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemaslahatan umat di lembaga pendidikan yang mencakup:
  - a. Kampanye publik menyasar kaum pelajar dan mahasiswa menggunakan media online terutama *platform* yang efektif dan berdampak;

- b. Pnyediaan konten informasi yang bisa diakses publik khususnya pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan komitmen kebangsaan, toleransi dan inklusivitas; dan
- c. Pengelolaan pusat informasi politik dan komitmen kebangsaan bagi pelajar dan mahasiswa.

Meski program serupa sudah dirancang dan dilaksanakan, namun fokus khusus penguatan moderasi beragama pada lembaga pendidikan masih perlu diupayakan. Selain pengenalan dan pengembangan pendidikan politik dan komitmen kebangsaan di dalam kelas termasuk di dalamnya kurikulum, materi dan buku ajar, diperlukan juga pengembangan kegiatan di luar kelas yang dapat mendukung penyerapan pemahaman dan pengamalan agama yang moderat, inklusif dan toleran. Program penguatan moderasi beragama seperti yang telah dilakukan di lingkungan Kementerian Agama misalnya dapat direplikasi di tingkat lembaga pendidikan dengan materi dan metode yang berbeda menyesuaikan kebutuhan pendidik dan pelajar yang berbeda dengan pejabat kementerian. Pelatihan moderasi beragama di kalangan guru dan dosen serta siswa dan mahasiswa hendaknya menawarkan variasi. Misal dari segi narasumber, disampaikan oleh pelatih dengan latar belakang agama, suku, budaya yang beragam e.g., aktivis lingkungan, pendeta, *influencer* dan lainnya. Begitu juga pada pengenalan pendidikan politik dan komitmen kebangsaan pada guru dan dosen perlu variasi program e.g., *In House Training*, *Beasiswa*, *Studi Banding*, *Program Perjumpaan Keragaman*, dan *Penelitian*.

Pun program yang dicanangkan untuk mempromosikan relasi, kerjasama dan persaudaraan sebangsa senegara di lembaga pendidikan bisa dibuat lebih variatif. Dialog dan ruang perjumpaan antar latar belakang yang berbeda penting untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Pada level pelajar baik siswa dan mahasiswa bisa dilakukan dengan program perjumpaan seperti *Karya Wisata*, *Kompetisi*, *Kunjungan* dan *Pertukaran Pelajar*. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat di tingkat pendidikan tinggi misalnya dapat mencakup target peserta dari latar belakang suku, agama dan budaya yang berbeda agar dapat secara optimal membangun rasa kesatuan dan kemanusiaan antar sesama warga negara Indonesia. Kegiatan penelitian juga hendaknya melibatkan kolaborasi antar perguruan tinggi baik negeri, swasta dan dari berbagai daerah. Program-program di atas adalah beberapa contoh kegiatan yang bisa diadopsi dalam penguatan moderasi beragama di lingkungan pendidikan.

Untuk dapat melaksanakan penguatan pendidikan politik dan komitmen kebangsaan di lingkungan pendidikan diperlukan perhatian khusus pada aspek regulasi, kelembagaan, anggaran, dan SDM. *Pertama*, diperlukan peningkatan alokasi dana pada

sektor pendidikan. Kelebihan sistem pendidikan di Indonesia adalah secara umum biaya pendidikan di Indonesia tergolong terjangkau. Hal ini disebabkan besarnya anggaran dana yang diberikan pada sektor pendidikan. Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20% yang bertujuan untuk mewujudkan visi 'mencerdaskan kehidupan bangsa' milik negara. Meski dalam penerapannya, penyerapan 20% dana pendidikan disalurkan melalui pembiayaan, dana desa atau transfer daerah dan belanja pemerintah. Bahkan menurut laporan Bank Dunia, tidak semua daerah optimal dalam menggunakan 20% dana pendidikan. Sebanyak 35% atau 12 dari 35 provinsi di Indonesia tidak mencapai angka 20% dari yang dianggarkan (World Bank, 2020).

Dalam laporan yang sama juga ditemukan bahwa dana yang dikeluarkan pada sektor pendidikan didominasi oleh pembayaran gaji guru dan lebih sedikit untuk selain gaji. Pembiayaan selain gaji bisa digunakan untuk berbagai program dan kegiatan terkait pendidikan seperti beasiswa, pelatihan dan biaya operasional lainnya yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Walaupun secara umum, alokasi dana yang besar di pendidikan telah meningkatkan akses pada pendidikan namun belum dapat meningkatkan capaian pembelajaran bagi siswa. Selain untuk program penunjang penguatan pendidikan politik dan komitmen kebangsaan, alokasi dana pendidikan yang lebih besar dapat digunakan untuk pengembangan kompetensi pengajar dan manajemen lembaga pendidikan. Perbaikan atau peningkatan infrastruktur pendukung juga bisa diperoleh dari dana pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi dana untuk pendidikan yang langsung dapat diaplikasikan dalam kapasitas penguatan moderasi beragama di lembaga pendidikan.

*Kedua*, penting untuk melibatkan guru dalam pengambilan kebijakan di dunia pendidikan. Idealnya, guru dilibatkan dalam struktur dalam dunia pendidikan. Jika memungkinkan, inovasi yang dapat dilakukan adalah pendirian sebuah unit khusus untuk profesi pendidik di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mengingat relevansi pendidik untuk mengatasi persoalan kebangsaan, keterlibatan pendidik langsung di dalam sistem dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kerangka kebijakan yang komprehensif bagi pengembangan guru pada sistem pendidikan termasuk penguatan moderasi beragama dalam lembaga pendidikan. Suara praktisi pendidikan tentu lebih dapat menjawab kebutuhan langsung di lingkungan pendidikan.

## VI. Penutup

Penguatan Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas dalam RPJMN merupakan salah satu langkah vital pemerintah dalam menciptakan Indonesia yang damai, aman dan berkesinambungan. Persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti sikap anti pemerintah, dukungan pada sistem politik khilafah, politisasi agama dan kepercayaan pada hoax serta ketidakpercayaan pada pemerintah kala pandemi merupakan tantangan dalam mewujudkan harmoni dan persatuan Indonesia. Keempat permasalahan yang banyak ditemukan di lingkungan pendidikan ini membutuhkan perhatian khusus agar dapat terjaga dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Untuk membangun lembaga pendidikan yang moderat, inklusif dan toleran sebagai solusi dari permasalahan kebangsaan yang sedang dihadapi, moderasi beragama dan nilai-nilai yang dikandungnya harus masuk ke dalam lembaga pendidikan. Diperlukan penerapan program penguatan Moderasi Beragama terutama berfokus pada aspek pendidikan politik dan komitmen kebangsaan di lingkungan pendidikan. Diantara program yang dapat dilaksanakan yaitu penguatan pendidikan politik dan komitmen kebangsaan di lembaga pendidikan dan pengembangan penyiaran narasi keagamaan yang menjunjung tinggi perdamaian dan kemaslahatan umat di lembaga pendidikan.

Permasalahan kebangsaan yang telah dipaparkan di atas memerlukan perhatian yang khusus demi terwujudnya lingkungan pendidikan yang dapat mendukung harmoni, perdamaian dan persatuan Indonesia. Telah juga dijabarkan beberapa rekomendasi kebijakan dan program yang dapat dirangkum dalam naskah kebijakan ini. Diharapkan naskah kebijakan ini dapat memberikan sedikit sumbangsih dalam perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berikutnya. Tentunya naskah kebijakan ini masih jauh dari sempurna dan sangat memerlukan lebih banyak substansi yang lebih baik maka masukan dan kritik sangat diperlukan. Menjaga dan merawat Indonesia adalah tugas seluruh lapisan masyarakat. Sangat diperlukan kontribusi dari berbagai pihak agar terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, harmonis dan damai.



Promoting Religious Moderation, Focusing on Education to  
Strengthen Social Stability in Indonesia in the Context of COVID-19

Gedung PPIM UIN Jakarta  
Jalan Kertamukti No. 5 Ciputat Timur,  
Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia  
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633  
E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com)  
Website: <https://conveyindonesia.com>

Collaborative Program:

